

**EFEKTIVITAS FUNGSI *CONTROLLING* PADA
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DINA NABILA HASIBUAN
2203100084

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **DINA NABILA HASIBUAN**

NPM : 2203100084

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, Tanggal : Kamis, 9 April 2026

Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.** (.....)

PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.** (.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.** Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : **DINA NABILA HASIBUAN**
NPM : 2203100084
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Fungsi *Controlling* Pada Program Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kota Medan

Medan, 17 Maret 2026

Pembimbing

IDA MARTINELLI, S.H., M.M.

NIDN. 0008036402

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

NIDN.0122118801

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ALFIN SALEH, S.Sos., MSP.

NIDN/ 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Dina Nabila Hasibuan**, NPM 2203100084 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di sautu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 7 Mei 2026

Yang Menyatakan



Dina Nabila Hasibuan

**EFEKTIVITAS FUNGSI *CONTROLLING* PADA
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I
KOTA MEDAN**

**Dina Nabila Hasibuan
2203100084**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi *controlling* dalam program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kota Medan, yang ditandai masih adanya genangan air, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi *controlling* pada program pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi *controlling* dalam pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada lurah, sekretaris lurah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *controlling* telah dilaksanakan melalui penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Secara fisik, pembangunan drainase telah sesuai standar, namun efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi faktor lingkungan, koordinasi antarinstansi, dan perilaku masyarakat. Tindakan perbaikan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Disarankan adanya peningkatan koordinasi lintas instansi, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sistem *controlling* yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: efektivitas, fungsi *controlling*, program, pembangunan infrastruktur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua`laikum Warrahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beriring dengan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam karena beliau lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang ini.

Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Efektivitas Fungsi Controlling pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kota Medan**”. Skripsi ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang paling utama Allah SWT. Terima kasih kepada *role model* dan cinta pertamanya penulis Ayahanda Alm. Supri Hidayat Hasibuan, seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan Ayah dan seorang ayah yang penulis rindukan. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, meskipun sudah tiada tapi masih mampu sekolah kan penulis sampai di jenjang S-1 keinginan Ayah terwujud.

Terima kasih semasa engkau hidup selalu memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa besar, sudah menjadi Ayah hebat, menjadi *support system*, mendo'a kan, dan terima kasih atas didikannya sampai penulis berusia 21 tahun hingga engkau lelah dengan sakit yang ada ditubuhmu, terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai di tahap ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa Ayah temani lagi, semoga Ayah melihat dari atas sana bahwa penulis sudah berhasil menyelesaikan S-1. *You will always be in my heart, I miss you pap*. Terima kasih kepada pintu surga dan kesayangannya penulis, Ibunda Adek Ani Siregar, seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan Mamak. Yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi kepada penulis serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih sudah menjadi rumah yang paling nyaman dan tempat penulis pulang. Semoga mamak selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan umur oleh Allah SWT.

Teruntuk Cinta dan Kasih

Seseorang yang menopang penulis selama lebih dari 9 bulan, menimang-nimang penulis sampai seusia tujuh, masih disuapi sampai sembilan belas tahun, lalu waktu berlarian membawa penulis ke umur dua-tiga.

Mereka adalah cinta dan kasih, yang mengizinkan penulis pergi ke tempat-tempat indah sekaligus menunggu penulis pulang. Ayah ibu penulis tidaklah sempurna, tapi demi Allah mereka adalah hal yang paling berharga dari semua yang telah Allah berikan.

Perjuangan penulis bukan apa-apa tanpa do'a mereka

“Tidak ada orang tua yang sempurna, dan tidak ada anak yang sempurna, tetapi
ada banyak momen yang sempurna di sepanjang jalan”

Dave Willis

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar
besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, S.Sos., MAP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izahsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendukung dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah dan Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah beserta warga Kelurahan Pulo Brayan Darat I yang menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
10. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Azzahra Puan Andara. teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan semangat yang terjalin menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kekasih tercinta, Muhammad Alwi, yang senantiasa hadir dengan dukungan, doa, semangat, serta bantuan moril selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap perhatian, pengertian, dan dukungan yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Medan, 15 Maret 2026
Penulis

Dina Nabila Hasibuan
2203100084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	11
2.1. Efektivitas	11
2.1.1. Pengertian Efektivitas.....	11
2.2. Controlling	12
2.2.1. Pengertian Controlling.....	12
2.2.2. Fungsi <i>Controlling</i>	13
2.3. Program	14
2.4. Pembangunan	16
2.4.1. Pengertian Pembangunan	16
2.4.2. Pembangunan Infrastruktur	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Kerangka Konsep	20
3.3. Definisi Konsep.....	21
3.4. Kategorisasi.....	23
3.5. Narasumber	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data.....	25
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	26
3.9.1. Visi dan Misi Kelurahan Pulo Brayon Darat I.....	26

3.9.2. Profil Kelurahan Pulo Brayan Darat I	28
3.9.3. Struktur Organisasi Kelurahan Pulo Brayan Darat I	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	31
4.2. Pembahasan.....	44
4.2.1. Analisis Hasil Wawancara.....	44
BAB V PENUTUP	51
5.1. Simpulan	51
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	29
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	21
Gambar 2. Kantor Kelurahan Pulo Brayon Darat I.....	28
Gambar 3. Struktur Organisasi Kelurahan Pulo Brayon Darat I.....	30
Gambar 4. Bersama Bapak Lurah Pulo Brayon Darat I.....	69
Gambar 5. Bersama Ibu Sekretaris Lurah Pulo Brayon Darat I.....	69
Gambar 6. Bersama Ibu Armayani Selaku Warga	70
Gambar 7. Bersama Ibu Yulaika Selaku Warga	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara	56
Lampiran 2. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul	59
Lampiran 3. SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	60
Lampiran 4. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi.....	61
Lampiran 5. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi.....	62
Lampiran 6. SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir.....	63
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	64
Lampiran 8. Surat Terima Penelitian	65
Lampiran 9. Surat Selesai Penelitian	66
Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka	67
Lampiran 11. Surat LoA	68
Lampiran 12. Dokumentasi.....	69
Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Controlling merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi anggaran, waktu pelaksanaan, maupun standar mutu. Dalam program pembangunan infrastruktur, fungsi controlling mencakup penentuan standar kerja, pemantauan pelaksanaan kegiatan, analisis perbandingan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan, serta pemberian tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Melalui penerapan pengendalian yang efektif, pelaksana pembangunan dapat mendeteksi berbagai permasalahan sejak tahap awal, seperti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, terjadinya pemborosan anggaran, maupun menurunnya kualitas hasil pembangunan, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Namun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan program pembangunan infrastruktur kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya mekanisme pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya akuntabilitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi controlling belum diterapkan secara maksimal, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur secara efektif.

Secara umum, pembangunan infrastruktur merupakan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah. Infrastruktur dipandang sebagai fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena berperan dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyediaan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung prinsip pelayanan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang akuntabel, pembangunan infrastruktur secara nasional diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pelayanan publik diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaannya dengan kebutuhan serta kondisi spesifik masyarakat setempat. Infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas lingkungan, dan kenyamanan hidup warga, sehingga pelayanan publik dapat dirasakan secara langsung. Keberhasilan pembangunan infrastruktur seperti di Kota Medan sangat ditentukan oleh perencanaan yang sesuai kebutuhan lokal, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang efektif, sehingga hasil pembangunan benar-benar berfungsi optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Kota Medan adalah kota metropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas perkotaan yang tinggi, sehingga menuntut ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, transportasi, dan fasilitas lingkungan menjadi kebutuhan penting guna menunjang

mobilitas masyarakat, mengurangi permasalahan perkotaan seperti kemacetan dan banjir, serta meningkatkan kualitas permukiman. Pembangunan infrastruktur di Kota Medan diarahkan tidak hanya pada kawasan pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah permukiman hingga tingkat kelurahan seperti Kelurahan Pulo Brayan Darat I, agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari aspek aksesibilitas, Pulo Brayan Darat I memiliki jalur utama transportasi melalui Jalan Bilal Ujung dan Jalan Mustafa, yang berfungsi sebagai penghubung antara kawasan hunian dengan pusat kegiatan ekonomi dan komersial di sekitarnya. Akses yang memadai ini menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa di wilayah tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan drainase, sebagai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik. Berdasarkan kondisi tersebut, Kelurahan Pulo Brayan Darat I menunjukkan keunggulan faktual berupa aksesibilitas yang baik, peningkatan infrastruktur yang berkesinambungan, serta potensi tata kelola wilayah yang mendukung pengembangan kawasan. Dengan demikian, kelurahan ini dapat dijadikan contoh representatif dalam penerapan strategi *controlling* atau pengendalian infrastruktur di tingkat perkotaan, khususnya di Kelurahan Pulo Brayan Darat I.

Di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, sejumlah masalah faktual masih menghambat tata kelola pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan dan drainase yang telah dilakukan kerap terhambat oleh rendahnya kepatuhan warga terhadap

kebersihan, sehingga fungsi infrastruktur berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah ini memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang mulai berkembang, pengawasan (*controlling*) yang lebih ketat dan partisipasi aktif masyarakat diperlukan. Penguatan tata kelola dan kesadaran warga menjadi kunci agar pembangunan berjalan merata, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan (*controlling*) oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan peraturan, standar pelayanan, serta tujuan pembangunan nasional.

Sebagai wilayah dengan tingkat aktivitas infrastruktur yang cukup tinggi, Kelurahan Pulo Brayan Darat I mendapatkan alokasi berbagai program peningkatan infrastruktur yang bersumber dari Swadaya Masyarakat. Meskipun berbagai proyek telah dilaksanakan, efektivitas fungsi *controlling* dalam pengawasan infrastruktur masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan rencana dan standar yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi bahwa *controlling* belum berjalan optimal, salah satunya disebabkan partisipasi masyarakat yang masih sangat terbatas dalam proses pengendalian infrastruktur.

Kepala Lingkungan dalam menjalankan fungsi *controlling* atau pengawasan

terhadap infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I masih tergolong belum optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya proses pengawasan terhadap pelaksanaan infrastruktur di tingkat kelurahan. Padahal, keterlibatan aktif Kepala Lingkungan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa infrastruktur berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat setempat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Kepala Lingkungan mengenai pentingnya peran pengawasan publik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Akibatnya, ruang partisipasi Kepala Lingkungan dalam proses *controlling* menjadi terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan kesadaran Kepala Lingkungan agar partisipasi publik dalam pengawasan dapat meningkat dan infrastruktur berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip kebutuhan masyarakat.

Masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan hasil implementasi di lapangan. Beberapa hasil infrastruktur menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, bahkan terdapat kasus di mana fasilitas yang dibangun mengalami kerusakan dalam waktu singkat setelah proyek selesai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi *controlling* atau pengawasan belum dijalankan secara efektif dan menyeluruh, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan infrastruktur. Padahal, efektivitas *controlling* memiliki peran penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan

infrastruktur seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari aspek kualitas hasil, tingkat kebermanfaatan bagi masyarakat, serta keberlanjutannya dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan fungsi *controlling* yang konsisten dan partisipatif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, pemerintah perlu menerapkan mekanisme *controlling* yang terstruktur dan menyeluruh, yang mencakup perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan, pemantauan secara berkala selama proses infrastruktur, serta evaluasi yang sistematis setelah proyek selesai. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan, tetapi juga memungkinkan identifikasi dini terhadap hambatan, penyimpangan, atau kendala teknis sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pengawasan yang konsisten dan komprehensif akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas keseluruhan infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I.

Fungsi *controlling* juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan infrastruktur dilaksanakan secara jujur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Lingkungan. Kepala Lingkungan dalam fungsi *controlling* menjadi aspek penting karena masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung hasil dari kegiatan

infrastruktur tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas fungsi *controlling* pada infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I telah berjalan sesuai prinsip manajemen publik yang baik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan fungsi *controlling* di tingkat kelurahan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur di tingkat pemerintahan paling bawah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan dalam konteks infrastruktur menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya fisik dan anggaran, tetapi sangat bergantung pada tata-kelola yang kuat, penerapan sistem pengawasan (*controlling*) yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh aktor lokal, termasuk pemerintah, aparat kelurahan, dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan infrastruktur memerlukan koordinasi yang baik, transparansi dalam pengelolaan proyek, dan kemampuan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan terhadap setiap tahapan infrastruktur. Penguatan fungsi *controlling* di tingkat kelurahan, seperti Pulo Brayon Darat I, menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kelurahan berperan dalam melakukan pemantauan lapangan, melaporkan kendala atau penyimpangan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan peran

tersebut, kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan publik yang menentukan efektivitas pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Dengan adanya informasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Fungsi *Controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kota Medan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana fungsi *controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Pulo Darat I?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk Mengetahui Fungsi *Controlling* Pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I”.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan akademik di bidang administrasi publik khususnya terkait penerapan fungsi *controlling* dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi *controlling* dalam program pembangunan pemerintah.

- c. Mengembangkan konsep dan model evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengawasan program pembangunan di level pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pihak kelurahan mengenai sejauh mana efektivitas fungsi controlling telah berjalan, serta area yang perlu ditingkatkan.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi aparat pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur.
- c. Memberikan rekomendasi strategi untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik sehingga pembangunan lebih terbuka dan akuntabel.
- c. Secara langsung memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hasil pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang diuraikan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang diuraikan adalah pengertian efektivitas, *controlling*, hubungan administrasi publik dengan *controlling*, program dan pembangunan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang diuraikan adalah metode penelitian, jenis penelitian, kerangka pemikiran, definisi konsep dan operasional, informan dan narasumber, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologis, efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effectiveness* dan dari kata dasar *effective* yang berarti berhasil, tepat guna, atau menghasilkan dampak sesuai tujuan. Dalam akar bahasa Latin, kata ini berasal dari *effectivus* yang bermakna menghasilkan atau menimbulkan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan (Oxford Dictionary, 2018)

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan seberapa jauh suatu organisasi atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, sasaran, dan manfaat yang diharapkan oleh penerima layanan publik. Semakin tinggi kesesuaian antara rencana dan hasil nyata yang dicapai, maka semakin efektif program tersebut.

Sedarmayanti (2020) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dalam menghasilkan output dan outcome secara optimal. Keberhasilan program harus tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Pada sektor pemerintahan, efektivitas berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, efektivitas dapat disimpulkan sebagai ukuran keberhasilan program dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat

sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada kesesuaian hasil dengan rencana, tetapi juga pada bagaimana sumber daya dikelola secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, efektivitas mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program yang mampu menghadirkan perubahan positif, nilai tambah, serta dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

2.2. Controlling

2.2.1. Pengertian Controlling

Secara etimologis, istilah *controlling* berasal dari kata “*control*” dalam bahasa Inggris yang diadaptasi dari bahasa Prancis Kuno “*contreroller*” atau “*contre-rolle*” yang berarti memeriksa, mengawasi, serta membandingkan catatan dengan daftar utama sebagai bentuk pengawasan (Oxford Dictionary, 2020). Dalam perkembangan maknanya, *controlling* kemudian dipahami sebagai upaya untuk mengendalikan serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.

Menurut Ida Martinelli dalam buku *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik* (2024), pengawasan merupakan prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan memerlukan perencanaan yang jelas, pembagian tugas dan wewenang kepada bawahan, serta menjadi dasar penting dalam menentukan perbaikan dan penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya

Controlling berperan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi

berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Terry (2017) menyatakan bahwa *controlling* adalah proses menentukan apa yang sedang dicapai, menilai kemajuan kerja, dan melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari rencana. *Controlling* berfungsi sebagai mekanisme evaluasi guna menjaga kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang berlaku.

2.2.2. Fungsi *Controlling*

Fungsi *controlling* atau pengendalian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan secara terarah sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membantu organisasi menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang benar.

Fungsi *controlling* (pengawasan) menurut George R. Terry meliputi beberapa tahapan:

- 1) Menetapkan standar, yaitu menentukan ukuran atau kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengukur pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan pemantauan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja.
- 3) Membandingkan hasil dengan standar, yaitu menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi serta mengidentifikasi penyimpangan.
- 4) Melakukan tindakan korektif, yaitu mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan kembali sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Controlling juga memperkuat prinsip *good governance* karena mendorong

pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sehingga aspirasi publik dapat menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan (Ramdani, 2020). Dengan demikian, *controlling* dan administrasi publik memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Putri & Firmansyah, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa *controlling* merupakan bagian esensial dari administrasi publik karena memastikan setiap aktivitas pemerintahan berjalan sesuai tujuan dan prinsip akuntabilitas yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, pelaporan, dan koreksi kebijakan, *controlling* menjamin efektivitas pelaksanaan program serta mendorong penerapan *good governance* melalui pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, *controlling* berperan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terpercaya oleh publik.

2.3. Program

Program dalam administrasi publik memegang peranan penting sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pemerintah, karena melalui program kebijakan yang bersifat konseptual dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Secara umum, program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang secara terencana dan terkoordinasi dalam suatu periode tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya (Nugroho, 2017). Dengan adanya program, pemerintah dapat mengoperasionalkan kebijakan sehingga memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Siagian (2019) juga menyatakan bahwa program merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik yang diformulasikan dalam rencana tindakan dengan kejelasan aktor pelaksana, penggunaan sumber daya, indikator pencapaian, serta prosedur pengawasan. Program menjadi pedoman dalam pemanfaatan sumber daya organisasi publik seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah.

Keban (2018) menambahkan bahwa suatu program perlu memenuhi karakteristik tertentu untuk berjalan efektif, antara lain:

- a. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta dapat diukur
- b. Dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan
- c. Menyasar kelompok penerima manfaat yang teridentifikasi
- d. Alokasi anggaran yang sesuai dengan cakupan kegiatan
- e. Memiliki sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program

Sejalan dengan perkembangan manajemen publik modern, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari output berupa hasil fisik atau administratif, tetapi juga dari outcome yaitu manfaat nyata dan kepuasan masyarakat serta dampak pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Nalil Khairiah (2021), menyatakan bahwa pelaksanaan program sangat penting dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan berlangsung secara efektif yang meliputi tujuan, sasaran, waktu, tempat, aktifitas, penanggung jawab, anggaran dan evaluasi. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi untuk memastikan ke semua aspek dapat berjalan secara sinkron dan harmonis.

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, penyusunan program pembangunan umumnya melalui tahapan perencanaan partisipatif seperti Musrenbang, sehingga setiap prioritas kegiatan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, program dapat dipandang sebagai alat strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan pemerataan pembangunan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.4. Pembangunan

2.4.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Goulet (2020) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya sistematis yang difokuskan pada peningkatan harkat dan martabat manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas individu, serta perluasan kesempatan dalam menentukan pilihan hidup. Artinya, pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menjamin pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi seluruh warga.

Arsyad (2021) menegaskan bahwa pembangunan harus dirancang secara terarah oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Keberhasilan pembangunan dapat ditinjau dari indikator peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi publik dalam proses pemerintahan

sebagai bagian dari peningkatan kualitas demokrasi.

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil, mendorong pemberdayaan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

2.4.2. Pembangunan Infrastruktur

Grigg (1988) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan penyediaan sistem fisik dasar yang mendukung fungsi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan energi, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Infrastruktur dipandang sebagai prasyarat utama bagi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

World Bank (1994) memandang pembangunan infrastruktur sebagai investasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Infrastruktur tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sebagai alat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kodoatie (2005) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah upaya terencana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana fisik yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara

menyeluruh. Maka dari itu dalam pembangunan infrastruktur perlu adanya penetapan standar. Menurut Ananda Mahardika (2022), standar merupakan ukuran atau kriteria tertentu yang digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Standar berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan proses kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya serta menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh. Dalam konteks pengawasan, perbandingan hasil dengan standar merupakan proses evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria atau target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan konsep tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan penyediaan sarana fisik dasar yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas teknis, tetapi juga sebagai investasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas akses layanan dasar, dan mendorong pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan penetapan standar sebagai pedoman agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Standar tersebut juga menjadi dasar dalam proses pengawasan melalui perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian pembangunan serta mengidentifikasi adanya penyimpangan yang memerlukan

perbaikan.

BAB III METODE PENELITIAN

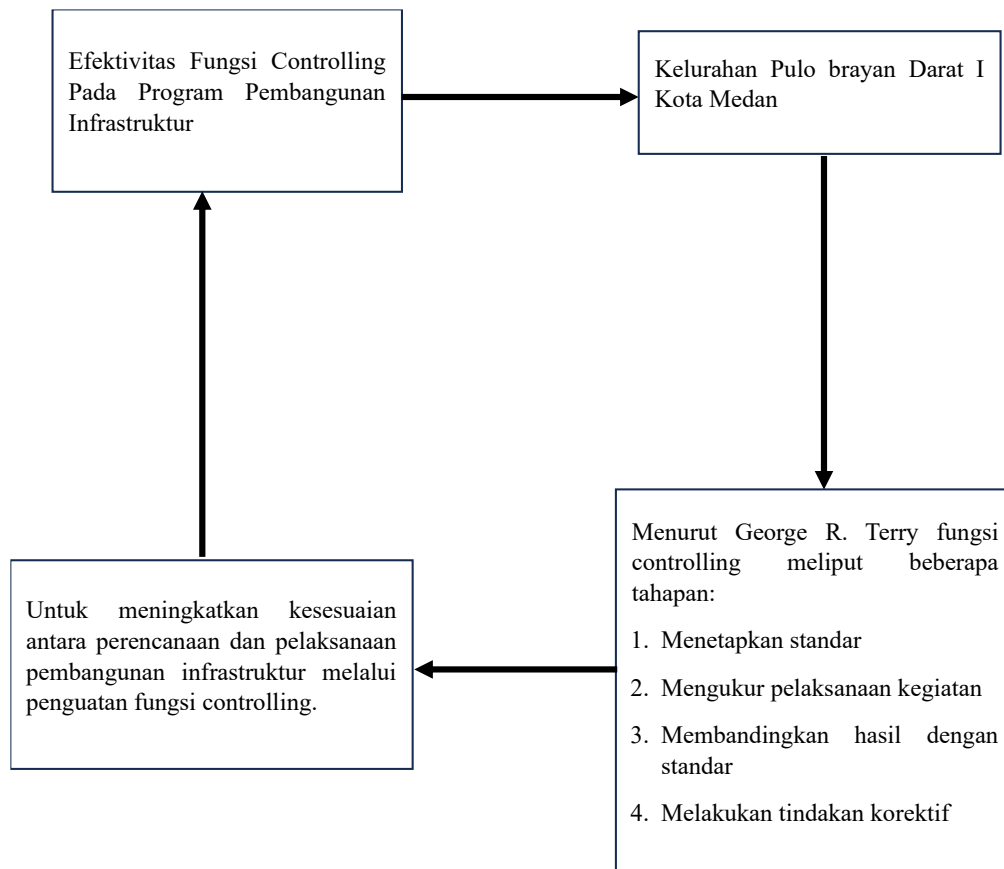
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam dalam konteks alami, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi nyata, proses, serta mekanisme yang berlangsung di lapangan sebagaimana adanya.

Menurut Furqany (2019), pendekatan kualitatif deskriptif memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi serta menafsirkan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial, dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang melingkupinya secara menyeluruh.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka Pemikiran menggambarkan bagaimana sebuah Efektivitas Fungsi Controlling pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, dikelola untuk mencapai tujuan tertentu.



Gambar 1. Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu gagasan atau pemikiran dasar yang berfungsi untuk menggambarkan secara abstrak fenomena, peristiwa, kelompok, maupun individu yang menjadi fokus kajian penelitian. Definisi konsep disusun dengan tujuan untuk menetapkan batasan istilah secara jelas dan konsisten, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, perumusan konsep berperan penting dalam menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru yang dapat mengaburkan arah dan tujuan penelitian (Sarwono, 2006).

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit pengertian yang akan diteliti adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (2020) , efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, tanpa memandang besar kecilnya sumber daya yang digunakan. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada keberhasilan pelaksanaan fungsi *controlling* dalam mendukung pencapaian tujuan program infrastruktur di kelurahan.

2. Fungsi *Controlling*

Fungsi *controlling* atau pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Hasibuan (2021), *controlling* adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan rencana, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Dalam penelitian ini, fungsi *controlling* diartikan sebagai upaya pemerintah kelurahan dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

3. Program Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah upaya terencana pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan sarana serta prasarana fisik yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Kementerian PUPR, 2021). Dalam

penelitian ini, program pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan penyediaan atau perbaikan fasilitas fisik di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik lainnya.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi yang menjadi dasar dalam penelitian ini didasari oleh pendapat George R. Terry sebagai berikut:

1. Adanya penetapan standar

Standar digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, baik dari segi waktu, biaya, kualitas pekerjaan, maupun target capaian. Dalam penelitian ini, penetapan standar dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan perencanaan program dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Adanya pengukuran pelaksanaan program

Pengukuran adalah proses penilaian terhadap sejauh mana kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengukuran ini mencakup pemantauan progres pekerjaan, penggunaan anggaran, serta keterlibatan pihak terkait. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan program di lapangan.

3. Adanya perbandingan hasil dengan standar

Perbandingan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses ini, dapat diketahui apakah program pembangunan infrastruktur telah berjalan sesuai rencana.

4. Adanya tindakan korektif

Tindakan korektif merupakan langkah perbaikan yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Tindakan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan, memperbaiki kekurangan, serta memastikan agar program pembangunan infrastruktur dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

3.5. Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, peneliti secara aktif hadir di lapangan untuk mengumpulkan data langsung dari narasumber atau melalui mediator yang menggunakan prosedur serupa. Untuk memperoleh informasi dari narasumber digunakan instrumen sebagai berikut:

- a) Pedoman wawancara mendalam yang memuat daftar topik yang harus digali.
- b) Alat perekam suara yang membantu peneliti mendapatkan data wawancara secara lengkap dan akurat.

1. Nama: Sofyan Efendi Saragih, ST., MT

Jabatan: Lurah, di Kelurahan Pulo Brayan Darat I

2. Nama: Risma Ria Siregar, SE

Jabatan: Sekretaris Lurah, di Kelurahan Pulo Brayan Darat I

3. Nama: Yulaika

Jabatan: Warga Sipil

4. Nama: Armayani

Jabatan: Warga Sipil

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat dari lapangan (Sugiyono, 2022). Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan penelitian.

- a) Wawancara: untuk memperoleh data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber
- b) Observasi: dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data terkait fenomena yang sedang diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022), analisis data kualitatif merupakan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan analisis data kuantitatif. Peneliti harus mampu memahami teori dan konsep secara mendalam agar hasil analisis tidak bersifat subjektif, tetapi berdasarkan temuan yang terverifikasi secara ilmiah. Analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga tahap akhir pengolahan data. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Untuk menjaga agar analisis kualitatif tidak melebar dari fokus penelitian, peneliti perlu melakukan beberapa tahapan berikut:

- a) Reduksi data: proses penyederhanaan dan pemilihan informasi penting dari data yang diperoleh di lapangan. Peneliti menyeleksi data yang relevan dan mengelompokkannya agar lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak data pertama dikumpulkan hingga tahap analisis akhir.
- b) Penyajian data: proses mengorganisasi informasi yang telah direduksi ke dalam

bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk uraian naratif, tabel, atau bagan yang menggambarkan keterkaitan antar kategori data. Tujuannya adalah membantu peneliti dalam menarik kesimpulan sementara.

- c) Kesimpulan atau verifikasi: proses akhir dari analisis data. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara berulang agar tetap konsisten dengan data lapangan yang sebenarnya.

Macam-macam analisis data kualitatif: analisis data kualitatif meliputi tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahap ini berlangsung secara interaktif dan terus-menerus selama penelitian berlangsung.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Pulo Brayan Darat I di Jl. Gunung Krakatau, Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Pulo Brayan Darat I di Jl. Gunung Krakatau, Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.9.1. Visi dan Misi Kelurahan Pulo Brayan Darat I

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

MISI

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

2. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

3.9.2. Profil Kelurahan Pulo Brayon Darat I



Sumber: Kelurahan Pulo Brayon Darat I

Gambar 2. Kantor Kelurahan Pulo Brayon Darat I

Medan Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini terletak di bagian timur pusat Kota Medan dan dikenal sebagai kawasan perkotaan yang cukup padat penduduk. Medan Timur memiliki peran penting sebagai wilayah pemukiman masyarakat serta pusat berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan usaha kecil. Letaknya yang strategis membuat kecamatan ini memiliki akses transportasi yang baik ke berbagai wilayah lain di Kota Medan. Kecamatan Medan Timur terdiri dari

beberapa kelurahan, di antaranya Pulo Brayan Darat I, Pulo Brayan Darat II, Glugur Darat I, Glugur Darat II, Pulo Brayan Bengkel, dan Pulo Brayan Bengkel Baru.

Kelurahan Pulo Brayan Darat I merupakan salah satu dari 11 kelurahan Medan Timur yang terletak pada 3°37'24" Lintang Utara (LU) dan 98°40'43" Bujur Timur (BT). Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulo Brayan Darat I berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tahun 2023 adalah 20.900 jiwa, dengan rincian 10.277 jiwa laki laki dan 10.623 jiwa perempuan dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 5223.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

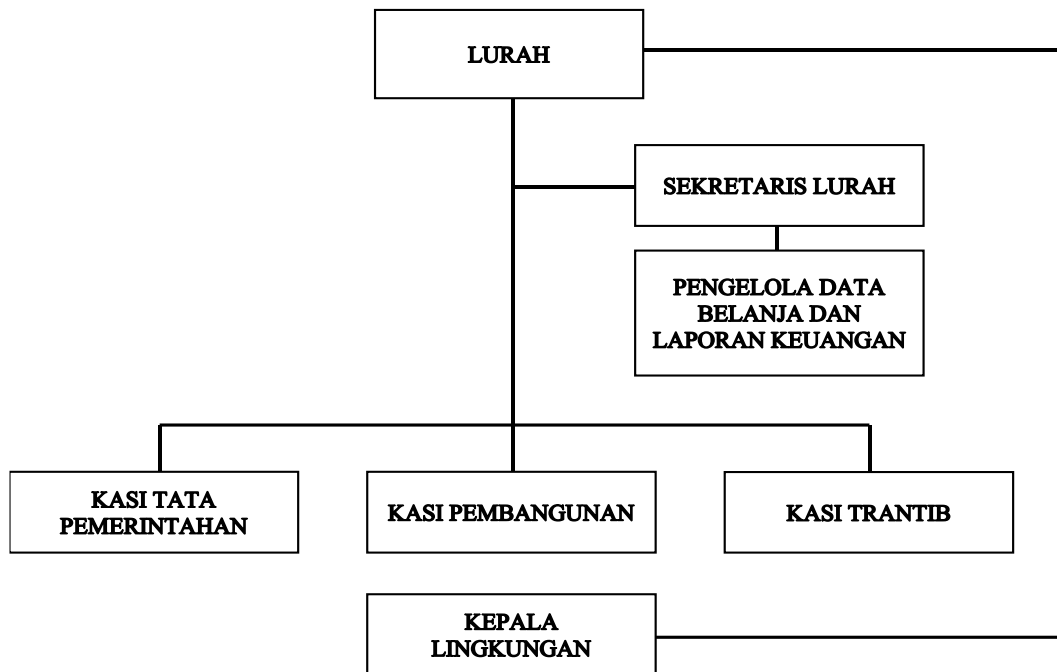
No.	Usia	Tahun 2023
1	0 – 19 Tahun	14236
2	20 – 54 Tahun	3976
3	≥59 Tahun	2688
Jumlah		20900

Sumber: Dinas kependudukan Kota Medan, 2023

Kelurahan Pulo Brayan Darat I memiliki 14 lingkungan dan sebagian besar merupakan kawasan pemukiman dengan luas wilayah ±87.448 m, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pulo Brayan Darat II
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Glugur Darat I
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Indra Kasih
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pulo Brayan Kota

3.9.3. Struktur Organisasi Kelurahan Pulo Brayan Darat I



Gambar 3. Struktur Organisasi Kelurahan Pulo Brayan Darat I

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya penetapan standar

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kualitas pekerjaan yang ditargetkan dalam standar sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Drainase di Jalan Bilal Ujung sebenarnya memiliki ukuran yang cukup besar dan secara teknis mampu menampung aliran air. Namun demikian, banjir masih sering terjadi terutama pada bagian yang mengarah ke Parit Busuk. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah karena wilayah tersebut berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara. Selain itu, penumpukan sampah dari aktivitas masyarakat, khususnya pedagang, juga menghambat aliran air sehingga memperparah genangan.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Secara kualitas pekerjaan, pembangunan drainase di Jalan Bilal Ujung telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Akan tetapi, permasalahan banjir masih terjadi karena aliran air menuju Parit Busuk sering mengalami hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan baik, permasalahan drainase belum sepenuhnya dapat teratasi tanpa adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi serta dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Pembangunan drainase yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah cukup baik dan mampu mengurangi genangan air di beberapa titik lingkungan. Namun demikian, pada saat hujan dengan intensitas tinggi, genangan air masih tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh aliran air yang tidak mengalir dengan

lancar, terutama akibat adanya penyumbatan pada saluran menuju Parit Busuk, sehingga air dapat meluap kembali ke area permukiman.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan drainase di Jalan Bilal Ujung telah dilaksanakan dengan kualitas yang cukup baik dan sesuai dengan standar yang berlaku serta mampu mengurangi genangan air di beberapa titik. Namun demikian, permasalahan banjir masih terjadi terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya aliran air menuju Parit Busuk, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pengelolaan serta adanya penumpukan sampah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar fungsi drainase dapat berjalan secara optimal.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggung jawab lurah dalam mengarahkan pelaksana kegiatan agar bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan dan penanganan drainase lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif. Lurah berperan dalam melakukan pengawasan secara administratif, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait, serta memantau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi teknis.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Pekerjaan teknis, seperti pembangunan dan penanganan drainase di jalan utama, merupakan kewenangan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan melalui Unit Pelaksana Dinas (UPD). Oleh karena itu, pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Lurah berperan dalam membantu menyampaikan keluhan masyarakat kepada instansi terkait apabila terjadi permasalahan pada drainase. Selain itu, lurah juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah ke saluran drainase. Di sisi lain, lurah juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, di mana setiap permasalahan yang terjadi akan dilaporkan kepada dinas terkait, sementara pelaksanaan teknis tetap menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab lurah dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan administratif, bukan teknis. Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah, serta memastikan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan tidak hanya bergantung pada peran lurah, tetapi juga pada koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang dilaksanakan.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah standar yang ditetapkan sudah realistis dan sesuai dengan kondisi Kelurahan Pulo Brayon Darat I?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Secara umum standar pembangunan drainase di Jalan Bilal Ujung telah diterapkan dengan baik. Saluran drainase di sisi kanan dan kiri jalan memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk menampung air hujan. Namun, genangan air masih dapat terjadi saat hujan deras karena adanya aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku

sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun standar drainase sudah sesuai dan kapasitas saluran cukup besar, permasalahan genangan masih terjadi akibat adanya penyumbatan sampah pada saluran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi drainase juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta perlunya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaannya.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Ukuran drainase yang ada dinilai sudah cukup besar, namun genangan air masih sering terjadi saat hujan deras. Hal ini disebabkan oleh adanya aliran air yang datang dari wilayah lain sehingga saluran tidak mampu menampung seluruh aliran air tersebut. Selain itu, penyumbatan sampah pada saluran drainase juga menjadi penyebab air tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar pembangunan drainase di Jalan Bilal Ujung pada umumnya telah sesuai dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung air hujan. Namun demikian, genangan air masih terjadi terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk serta penyumbatan sampah pada saluran drainase yang menghambat kelancaran aliran air. Oleh karena itu, efektivitas fungsi drainase tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian standar, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta pengelolaan saluran secara berkelanjutan.

b. Adanya Pengukuran Pelaksanaan Program

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan pembangunan yang berjalan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Pembangunan drainase di wilayah tanggung jawab kelurahan, khususnya di sekitar Lapangan Gajah Mada, telah selesai pada tahun 2023 dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Saluran drainase yang dibangun memiliki kapasitas yang memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya, namun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun pembangunan drainase telah berjalan sesuai rencana dan memiliki kapasitas yang cukup, masih terdapat kendala yang mempengaruhi kelancaran aliran air. Salah satu penyebabnya adalah kondisi saluran drainase di kawasan perumahan yang kurang sesuai sehingga menahan sampah dan menyebabkan penyumbatan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan serta dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Pembangunan drainase di wilayah tersebut telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, genangan air masih kadang terjadi, terutama ketika terdapat sampah yang menyumbat saluran atau ketika aliran air dari wilayah lain cukup besar sehingga saluran tidak mampu menampung seluruh aliran air.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan drainase di wilayah sekitar Lapangan Gajah Mada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, genangan air masih sesekali terjadi akibat adanya aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk serta penyumbatan sampah pada saluran drainase. Oleh karena itu, efektivitas fungsi drainase memerlukan koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. Menurut Bapak/ibu, seberapa penting kegiatan pemantauan dalam memastikan

pembangunan berjalan sesuai rencana?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Kegiatan pemantauan sangat penting untuk memastikan pembangunan drainase berjalan sesuai rencana dan tetap berfungsi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, lurah bersama kepala lingkungan (kepling) melakukan pemantauan dengan mengidentifikasi kerusakan atau permasalahan pada saluran drainase dan melaporkannya kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan agar dapat ditindaklanjuti.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Pemantauan tidak hanya bertujuan menilai kondisi saluran drainase, tetapi juga memastikan adanya perawatan agar saluran tidak rusak dan tidak menimbulkan genangan air. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain penempatan pipa warga di tengah saluran serta penumpukan sampah di Parit Busuk yang dapat menyebabkan penyumbatan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dinilai sangat penting, karena dengan adanya pemantauan, kerusakan atau penyumbatan pada saluran drainase dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, permasalahan dapat segera ditangani sehingga genangan air dapat diminimalkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan pembangunan dan kondisi drainase memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan saluran tetap berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan genangan air. Pemantauan dilakukan oleh pihak kelurahan bersama kepala lingkungan dengan mengidentifikasi kerusakan atau penyumbatan, kemudian melaporkannya kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya pemantauan yang rutin, berbagai permasalahan

seperti penumpukan sampah maupun kerusakan saluran dapat segera diketahui dan ditangani sehingga fungsi drainase dapat tetap terjaga secara optimal.

3. Menurut Bapak/ibu, apakah pemantauan yang dilakukan selama ini sudah cukup membantu meningkatkan ketertiban dan kualitas pembangunan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan melalui lurah dan kepala lingkungan (kepling) secara rutin cukup membantu menjaga ketertiban serta kualitas pembangunan drainase di wilayah Jalan Bilal Ujung. Pemantauan dilakukan dengan meninjau titik-titik yang rawan banjir, memeriksa kondisi saluran drainase, serta mengidentifikasi kerusakan yang kemudian dilaporkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun pemantauan telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase serta aktivitas pedagang yang menumpuk sampah di sepanjang jalan sehingga menghambat aliran air.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dinilai cukup membantu karena kondisi drainase menjadi lebih sering diperhatikan dan permasalahan pada saluran dapat lebih cepat diketahui. Namun demikian, genangan air masih dapat terjadi terutama apabila terdapat penumpukan sampah pada saluran drainase.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan secara rutin dinilai cukup membantu dalam menjaga ketertiban serta kualitas pembangunan drainase di wilayah Jalan Bilal Ujung. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi

oleh perilaku masyarakat, khususnya kebiasaan membuang sampah ke saluran drainase serta aktivitas pedagang yang menyebabkan penumpukan sampah. Oleh karena itu, selain pemantauan yang berkelanjutan, diperlukan juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar fungsi drainase dapat berjalan secara optimal.

c. Adanya Perbandingan Hasil Dengan Standar

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah hasil pembangunan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Hasil pembangunan drainase di wilayah tersebut secara fisik sudah sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan. Saluran drainase dibangun dengan ukuran yang cukup besar dan memiliki struktur yang memadai sehingga memudahkan proses pemeliharaan.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Efektivitas fungsi drainase tidak hanya bergantung pada kondisi fisik saluran, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan merawat saluran. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kebersihan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalnya fungsi drainase, sehingga kegiatan gotong royong sangat diperlukan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Pembangunan drainase saat ini dinilai sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dan sesuai dengan rencana, karena ukuran saluran yang dibangun lebih besar sehingga dapat menampung aliran air dengan lebih baik. Namun demikian, kebersihan saluran masih perlu dijaga oleh masyarakat agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil

pembangunan drainase di wilayah tersebut secara fisik telah sesuai dengan rencana dan memiliki ukuran serta struktur yang memadai sehingga dapat berfungsi dengan baik. Namun demikian, optimalnya fungsi drainase tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembangunan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan kegiatan gotong royong secara rutin agar aliran air tetap lancar dan genangan dapat diminimalkan.

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang biasanya terlibat dalam melihat atau menilai kesesuaian hasil pembangunan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Penilaian kesesuaian hasil pembangunan melibatkan lurah sebagai pengawas di tingkat kelurahan bersama dengan instansi terkait sesuai dengan jenis proyek yang dilaksanakan. Proses pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai kewenangannya. Pembangunan perumahan diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Medan, sedangkan pembangunan drainase dan jalan diawasi oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan. Untuk proyek yang menjadi kewenangan provinsi, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, proses pengawasan juga semakin transparan karena turut dipantau oleh media.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Pihak kelurahan bersama dengan dinas terkait biasanya terlibat dalam

melihat dan menilai kondisi hasil pembangunan secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam memperhatikan hasil pembangunan, dan apabila terdapat masalah atau ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikannya kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kesesuaian hasil pembangunan dilakukan melalui kerja sama antara pihak kelurahan sebagai pengawas di tingkat wilayah dan instansi teknis sesuai dengan kewenangannya. Proses pengawasan juga dinilai semakin transparan karena turut dipantau oleh media serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang dapat memperhatikan dan menyampaikan apabila terdapat permasalahan pada hasil pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas pembangunan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil dengan standar terjadi?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dan standar yang ditetapkan umumnya dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan proyek di lapangan. Meskipun pembangunan telah mengikuti kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan sehingga perencanaan memenuhi standar teknis, pelaksanaan di lapangan terkadang belum berjalan secara optimal.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Selain faktor pelaksanaan proyek, ketidaksesuaian juga dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara standar teknis yang ditetapkan dengan harapan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengharapkan hasil pembangunan yang melebihi standar yang telah ditentukan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Ketidaksesuaian hasil pembangunan dapat terjadi karena kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan perencanaan awal yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, faktor kebersihan saluran dan perilaku masyarakat juga memengaruhi hasil pembangunan, terutama apabila saluran drainase tidak dijaga kebersihannya sehingga menimbulkan penyumbatan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dan standar yang ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas pelaksanaan proyek di lapangan, perbedaan antara standar teknis dengan harapan masyarakat, kondisi lapangan yang tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran. Oleh karena itu, keberhasilan hasil pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada pelaksanaan yang optimal serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun.

d. Adanya Tindakan Korektif

1. Menurut Bapak/Ibu, temuan apa saja yang biasanya memerlukan perbaikan?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Identifikasi kebutuhan perbaikan pembangunan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi drainase dan dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun genangan air di wilayah tersebut relatif terkendali, kapasitas resapan air masih terbatas karena banyak permukaan yang telah diaspal atau disemen.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Hambatan aliran air sering disebabkan oleh penumpukan sampah serta penempatan pipa di tengah parit yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, dilakukan pengorekan dan kontrol berkala pada parit besar untuk menilai apakah diperlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut pada saluran drainase.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Kebutuhan perbaikan biasanya dapat terlihat ketika air mulai tergenang atau ketika aliran air pada saluran drainase tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, tanda lain yang menunjukkan perlunya perbaikan adalah ketika saluran drainase tersumbat oleh sampah atau mengalami kerusakan sehingga menghambat aliran air.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perbaikan pembangunan drainase dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap kondisi saluran dan dampaknya terhadap lingkungan. Perbaikan umumnya diperlukan ketika terjadi hambatan aliran air, genangan, penyumbatan sampah, kerusakan saluran, serta berkurangnya kapasitas resapan air. Pengawasan dan pemantauan secara berkala sangat diperlukan agar permasalahan pada drainase dapat segera diketahui dan ditangani secara tepat.

2. Menurut Bapak/Ibu, bentuk perbaikan apa yang biasanya dilakukan ketika pembangunan tidak berjalan sesuai rencana?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Perbaikan terhadap pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana biasanya dilakukan oleh tim teknis dari instansi terkait berdasarkan temuan di lapangan. Dalam hal ini, lurah berperan secara koordinatif dengan melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab karena penilaian teknis secara langsung bukan menjadi kewenangan pihak kelurahan.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Ketidaksesuaian dalam pembangunan, seperti spesifikasi pekerjaan atau penggunaan material yang kurang sesuai, dapat diketahui melalui pengawasan tim teknis maupun informasi dari media sebagai bagian dari keterbukaan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait akan melakukan perbaikan agar hasil pembangunan kembali sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian pada hasil pembangunan, biasanya perbaikan akan dilakukan oleh pihak terkait setelah adanya laporan dari masyarakat maupun dari pihak kelurahan. Perbaikan umumnya dilakukan dengan memperbaiki bagian saluran yang rusak atau tersumbat agar dapat kembali berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan genangan air.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbaikan terhadap pembangunan yang tidak sesuai rencana dilakukan oleh tim teknis dari instansi terkait berdasarkan temuan di lapangan maupun laporan dari masyarakat dan pihak kelurahan. Pihak kelurahan berperan secara koordinatif dengan menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang, sementara perbaikan teknis dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan kembali sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan perbaikan yang dilakukan sudah mampu menyelesaikan masalah yang muncul?

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Efendi Saragih, ST., MT selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Tindakan perbaikan terhadap pembangunan yang tidak sesuai standar umumnya dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, lurah berperan secara koordinatif dengan mengusulkan lokasi atau kebutuhan perbaikan kepada instansi terkait.”

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ibu Risma Ria Siregar, SE selaku

sekretaris lurah, yang menyatakan bahwa:

“Apabila ditemukan kekurangan dalam pembangunan, seperti penggunaan material atau ukuran yang tidak sesuai, pihak terkait akan melakukan perbaikan melalui tahapan pemeriksaan dan penyesuaian. Namun, pada proyek yang bersumber dari dana kelurahan terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan umumnya hanya dapat dilakukan pada gang-gang kecil dan belum mencakup jalan besar.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Yulaika dan Ibu Armayani, menunjukkan bahwa:

“Perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait biasanya cukup membantu dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada saluran drainase. Namun demikian, perbaikan tersebut masih memerlukan pemeliharaan lanjutan agar saluran drainase dapat terus berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan genangan air.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan terhadap pembangunan yang tidak sesuai standar telah dilakukan oleh instansi teknis melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian agar kembali sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pihak kelurahan berperan secara koordinatif dengan mengusulkan kebutuhan perbaikan kepada instansi terkait. Meskipun perbaikan yang dilakukan cukup membantu dalam mengatasi permasalahan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta perlunya pemeliharaan lanjutan agar saluran drainase tetap berfungsi secara optimal.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Hasil Wawancara

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana fungsi *controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Pulo Darat I Kota Medan, maka penulis menganalisis perolehan data primer dari

hasil penelitian yang disajikan sebelumnya.

Dari seluruh data penelitian tersebut, maka akan diberikan analisis tentang fungsi *controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Pulo Darat I Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan data sekunder yakni berupa teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini.

a. Adanya penetapan standar

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ida Martinelli dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (2024), pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana melalui penetapan standar dan pembagian tugas yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *controlling* dalam Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I telah diterapkan melalui penetapan standar teknis pembangunan drainase sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, genangan air masih terjadi akibat beberapa faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan masyarakat, diketahui bahwa pembangunan drainase di Jalan Bilal Ujung pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dan dinilai mampu mengurangi genangan air di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan drainase telah dirancang dengan kapasitas yang cukup untuk menampung aliran air hujan pada kondisi normal. Namun demikian, genangan air masih terjadi terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk,

penyumbatan sampah pada saluran drainase, serta keterbatasan kewenangan kelurahan dalam menangani saluran yang berada di bawah tanggung jawab instansi lain. Selain itu, peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan drainase lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait serta memantau pelaksanaan kegiatan oleh dinas teknis.

Dapat disimpulkan bahwa standar pembangunan drainase telah sesuai dan cukup memadai, namun efektivitasnya dalam mengatasi genangan air juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase.

b. Adanya pengukuran pelaksanaan program

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nalil Khairiah (2021), pengukuran pelaksanaan program dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif melalui kesesuaian tujuan, sasaran, waktu, serta adanya koordinasi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I telah berjalan sesuai dengan rencana, seperti pembangunan drainase di sekitar Lapangan Gajah Mada yang selesai pada tahun 2023 dan telah dilakukan pemantauan oleh lurah serta kepala lingkungan. Namun, efektivitas drainase dalam mengatasi genangan air belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, temuan penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan teori tersebut, meskipun keberhasilan program juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan masyarakat, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan drainase di wilayah sekitar Lapangan

Gajah Mada pada umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selesai pada tahun 2023. Pembangunan tersebut dinilai memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya serta memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung aliran air hujan pada kondisi normal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mengikuti perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah.

Namun demikian, genangan air masih kadang terjadi terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran air dari wilayah lain yang bermuara ke Parit Busuk serta penyumbatan sampah karena perilaku masyarakat yang masih membuang sampah pada saluran drainase. Selain itu, kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan bersama kepala lingkungan juga dinilai cukup membantu dalam menjaga kondisi dan kualitas drainase, karena permasalahan yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan drainase pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan rencana dan pemantauan yang dilakukan cukup membantu dalam menjaga fungsi saluran. Namun, efektivitasnya dalam mengatasi genangan air masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta perilaku masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi antarinstansi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase agar fungsi infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.

c. Adanya perbandingan hasil dengan standar

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ananda Mahardika (2022), standar

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai dasar untuk menilai kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan drainase dalam Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I secara fisik telah sesuai dengan rencana dan standar teknis yang berlaku. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor nonteknis, seperti kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran. Dengan demikian, perbandingan hasil dengan standar menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah sesuai secara teknis, tetapi keberhasilannya juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar aspek teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan masyarakat, diketahui bahwa hasil pembangunan drainase secara umum telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari kondisi fisik saluran yang memiliki ukuran dan struktur yang memadai sehingga mampu menampung aliran air serta dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, optimalnya fungsi drainase tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran. Selain itu, penilaian kesesuaian hasil pembangunan dilakukan melalui kerja sama antara pihak kelurahan sebagai pengawas di tingkat wilayah dengan instansi teknis sesuai dengan kewenangannya, serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan pada dasarnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, potensi ketidaksesuaian masih dapat terjadi akibat faktor pelaksanaan proyek di lapangan, kondisi lingkungan, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase.

d. Adanya tindakan korektif

Berdasarkan teori George R. Terry, tindakan korektif dalam fungsi pengawasan dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan agar kegiatan kembali sesuai rencana atau standar, melalui perbaikan pekerjaan, metode, penggunaan sumber daya, atau pengawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, tindakan korektif diterapkan ketika muncul kendala seperti penyumbatan saluran, kerusakan drainase, atau hambatan aliran air, yang diperbaiki oleh instansi teknis berdasarkan pemantauan dan laporan dari kelurahan serta masyarakat. Dengan demikian, praktik di lapangan sejalan dengan teori, yakni tindakan korektif dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap sesuai standar dan tujuan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan masyarakat, kebutuhan perbaikan drainase dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap kondisi saluran dan dampaknya terhadap lingkungan, seperti genangan air, hambatan aliran, penyumbatan sampah, kerusakan saluran, atau berkurangnya kapasitas resapan air. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pemantauan secara berkala agar masalah pada drainase dapat segera diketahui dan ditangani.

Bentuk perbaikan dilakukan oleh tim teknis dari instansi terkait berdasarkan temuan lapangan maupun laporan dari kelurahan dan masyarakat, sedangkan kelurahan berperan secara koordinatif dalam menyampaikan temuan atau usulan perbaikan. Tindakan perbaikan biasanya meliputi pengorekan saluran yang tersumbat, perbaikan kerusakan, dan penyesuaian ukuran saluran agar aliran air

kembali lancar. Meskipun tindakan perbaikan cukup membantu mengatasi masalah, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kondisi lapangan, dan perlunya pemeliharaan lanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa perbaikan drainase pada dasarnya telah dilakukan sesuai prosedur dan cukup efektif, namun keberhasilannya tergantung pada koordinasi antarinstansi, pemantauan rutin, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase agar fungsi infrastruktur dapat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditentukan bahwa Efektivitas Fungsi *Controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kota Medan sudah terlaksana namun belum optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Fungsi *Controlling* pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kota Medan telah terlaksana namun belum optimal dikarenakan:

1. Standar pembangunan drainase telah diterapkan dengan baik dan cukup memadai untuk menampung aliran air hujan. Namun, efektivitas drainase tidak hanya ditentukan oleh kualitas fisik saluran, melainkan juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kondisi lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara perencanaan teknis, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat agar fungsi drainase dapat berjalan optimal.
2. Pengukuran pelaksanaan pembangunan melalui pemantauan rutin oleh pihak kelurahan dan kepala lingkungan menunjukkan bahwa program secara umum telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Meski demikian, efektivitas pengukuran masih dipengaruhi oleh aliran air dari wilayah lain, penyumbatan sampah, serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran program perlu didukung oleh koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat agar fungsi drainase lebih efektif.
3. Hasil pembangunan drainase secara fisik telah memenuhi standar teknis yang berlaku, tetapi efektivitasnya terbatas oleh pelaksanaan proyek yang tidak selalu optimal, kondisi lingkungan eksternal, dan rendahnya partisipasi

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar fisik saja tidak cukup, keberhasilan program menuntut koordinasi antarinstansi, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat agar drainase dapat berfungsi secara maksimal.

4. Tindakan korektif telah dilakukan sesuai prosedur dan cukup membantu mengatasi permasalahan drainase. Namun, efektivitas perbaikan tetap terbatas oleh keterbatasan anggaran, kondisi lapangan, dan perilaku masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan drainase bergantung tidak hanya pada perbaikan teknis, tetapi juga pada koordinasi antarinstansi yang kuat, pemantauan rutin yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat agar fungsi saluran dapat terjaga secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kelurahan perlu melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah ke saluran drainase. Peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendukung keberfungsian infrastruktur yang telah dibangun.
2. Kegiatan pemantauan terhadap kondisi drainase perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan oleh pihak kelurahan bersama kepala lingkungan. Pemantauan yang rutin akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan lebih dini sehingga tindakan penanganan dapat segera dilakukan.

3. Pemerintah kelurahan disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara, khususnya dalam menangani sistem drainase yang bermuara ke Parit Busuk. Koordinasi yang lebih intensif diperlukan agar penanganan permasalahan genangan air dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
4. Pemerintah kelurahan bersama instansi terkait disarankan untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap pipa perumahan yang dipasang di tengah saluran drainase, karena penempatan tersebut berpotensi menghambat aliran air dan menimbulkan penyumbatan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemasangan pipa rumah tangga mengikuti standar teknis sehingga tidak mengganggu fungsi drainase.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2021). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ayunda, L., & Mahardika, A. (2022). Strategi manajemen organisasi dalam upaya meningkatkan keaktifan kader perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1).
- Furqany, S. (2019). Strategi Komunikasi Dakwah Melalui Bantuan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (Act) Aceh Dalam Menarik Minat Donasi (Studi Pada Kasus Konflik Rohingya). *Jurnal Al-Bayan*, 24(2), 256–270. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i2.3680>
- Grigg, N. S. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. New York: Wiley.
- Handyaningrat, S. (2018). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ida Martinelli, S. H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. umsu press.
- Keban, Y. T. (2018). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian PUPR. (2021). *Infrastruktur untuk Negeri*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Khairiah, N., & Nasution, N. M. (2024). Fungsi koordinasi vertikal kepemimpinan lurah dalam program seram di kota medan. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 5(1), 1-15.
- Kodoatie, R. J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Oxford Dictionary. (2018). *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press.
- Oxford Dictionary. (2020). *Definition of Control*. Oxford University Press.
- Putri, R., & Firmansyah, M. (2023). *Good Governance dan Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ramdani, A. (2020). *Good Governance dan Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 145–158.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2019). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2017/2020). *Principles of Management*. (Edisi terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Bank. 1994. *World Development Report: Infrastructure for Development*. Oxford University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara



NARASUMBER

1. Nama: Sofyan Efendi Saragih, ST., MT
Jabatan: Lurah, di Kelurahan Pulo Brayan Darat I
2. Nama: Risma Ria Siregar, SE
Jabatan: Sekretaris Lurah, di Kelurahan Pulo Brayan Darat I
3. Nama: Yulaika
Jabatan: Warga Sipil
4. Nama: Armayani
Jabatan: Warga Sipil

Draft Wawancara Skripsi

Nama : Dina Nabila Hasibuan
NPM : 2207106084
Prodi : Ilmu Administrasi Publik

JUDUL: EFEKTIVITAS FUNGSI *CONTROLLING* PADA PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN
DARAT I KOTA MEDAN

- I. Adanya penetapan standar
Standar digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, baik dari segi waktu, biaya, kualitas pekerjaan, maupun target capaian. Dalam penelitian ini, penetapan standar dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan perencanaan program dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kualitas pekerjaan yang ditargetkan dalam standar sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat?

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggung jawab lurah dalam mengarahkan pelaksana kegiatan agar bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah standar yang ditetapkan sudah realistis dan sesuai dengan kondisi Kelurahan Pulo Brayan Darat I?

II. Adanya pengukuran pelaksanaan program

Pengukuran adalah proses penilaian terhadap sejauh mana kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengukuran ini mencakup pemantauan progres pekerjaan, penggunaan anggaran, serta keterlibatan pihak terkait. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan program di lapangan.

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan pembangunan yang berjalan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bapak/ibu, seberapa penting kegiatan pemantauan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana?
3. Menurut Bapak/ibu, apakah pemantauan yang dilakukan selama ini sudah cukup membantu meningkatkan ketertiban dan kualitas pembangunan

III. Adanya perbandingan hasil dengan standar

Pembandingan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses ini, dapat diketahui apakah program pembangunan infrastruktur telah berjalan sesuai rencana.

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah hasil pembangunan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang biasanya terlibat dalam melihat atau menilai kesesuaian hasil pembangunan?
3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil dengan standar terjadi?

IV. Adanya tindakan korektif

Tindakan korektif merupakan langkah perbaikan yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Tindakan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan, memperbaiki kekurangan, serta memastikan agar program pembangunan infrastruktur dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

1. Menurut Bapak/Ibu, temuan apa saja yang biasanya memerlukan perbaikan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bentuk perbaikan apa yang biasanya dilakukan ketika pembangunan tidak berjalan sesuai rencana?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan perbaikan yang dilakukan sudah mampu menyelesaikan masalah yang muncul?

Lampiran 2. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DBAN-PT/IAK/KP/PT/TK/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622403 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @https://fkip.umsu.ac.id * fkip@umsu.ac.id #umsamedan @umsamedan #umsamedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH) 3 November

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 2025.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Dina Nabila Hasibuan
 NPM : 2203100084
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan aks : 125 sks, IP Kumulatif 3,36

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul	Paraf
1	Efektivitas Fungsi Controlling pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo brayan darat 1. Kota Medan	<i>[Signature]</i>
2	Efektivitas Program pembangunan Infrastruktur Ramah lingkungan di Rantauprapat.	
3	Analisis penggunaan media Sosial Instagram terhadap komunikasi pembangunan di kota medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing
 Medan, tgl. 27... Oktober... 2025.

[Signature]
 (Ananda Maharjika, S.Sos, M.Si)
 NIDN: 0122118801

(025) ps: IDA MARTINELLY SH.MM

Pemohon,
[Signature]
 (Dina Nabila Hasibuan)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:

(IDA MARTINELLY SH., M.M...)
 NIDN:



Lampiran 3. SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/03/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1972/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DINA NABILA HASIBUAN**
 N P M : 2203100084
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 025.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 13 Djumadil Awal 1447 H
 04 November 2025 M


 Assoc. Prof. Dr. **ABRIN SALEH, MSP.**
 NIDN/0030017402



Tambahan

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Lampiran 4. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAA/KP/PT/002/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umhu.ac.id> fkip@umhu.ac.id www.umamedan.ac.id www.umamedan.ac.id www.umamedan.ac.id www.umamedan.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 17 November 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dina Nabila Hasibuan
 NPM : 2203100084
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor 1331/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025, tanggal 04 November 2025, dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN
 DARAT I KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(ANANDA MARAPORA S.Sos.MSP)
 NIDN: 0122116001

Menyetujui
 Pembimbing

(IDA MARTINEWI S.H.,M.M.)
 NIDN: 008036402

Pemohon,

(DINA NABILA HASIBUAN)



Lampiran 5. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2284/UND/13.AJ/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

UMSU
UIN Sunan Gunung Djati

SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGADILAN	PEMISAH	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DAI NADIA HASBIYAH	22010004	Dr. KHANDEL ALI, S.Sos., MPA	Dr. DA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN DAMAT 1 KOTA MEDAN
2	SINDA MELLYSA PUTRI	22010001	Dr. GEDIANRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. NALL KHARIRAH, S.P., M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM BUDIDAYA IKAN PATIN PADA BUMDES SUBSER REZKI DI DESA TEJUK MAJU KECAMATAN TAMBORA
3	AULIA LISBE	22010040	Dr. GEDIANRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. NALL KHARIRAH, S.P., M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANISASI PROGRAM SAMPAH MELALUI BERBAH (BEDEK) DI KECAMATAN MEDAN TENGGUNG
4	DIKY ZAHYAH AZ-ZHARD	22010003	Dr. KHANDEL ALI, S.Sos., MPA	Dr. NALL KHARIRAH, S.P., M.Pd	EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SAMPAH RUMAH (USRA) PADA KOPRASRI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANGK 2
5	RENA NURKASARI	22010007	Dr. JENAR RIDHO SHARIFAH, S.Sos., M.Si	Dr. DA MARTINELLI, S.H., M.M.	PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI BERKAWAN TERKAMPUS KEPLASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN AIR SATU KABUPATEN

Medan, 19 Desember 2025
2025 M

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP.)

Lampiran 6. SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/02/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> * fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dina Nabila Hasibuan
 N.P.M : 22.03100084
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Epektivitas Fungsi controlling pada
 Judul Skripsi : Program Pembangunan Infrastruktur
Di Kelurahan Pulo Broyan darat 1 kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi Bimbingan	Peny. Pembimbing
1.	10/11-2025	Bimbingan Proposal	
2.	12/11-2025	Bimbingan proposal	
3.	15/11-2025	Acc Proposal	
4.	8/02-2026	Bimbingan draft wawancara	
5.	10/02-2026	Acc draft wawancara	
6.	14/03-2026	Bimbingan bab 1-5	
7.	16/03-2026	Revisi bab 1-5	
8.	17/03-2026	Acc Skripsi	

Medan, 17 Maret 2026

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
 NIDN : 0030017402

(Ariand Mahardika, S.Sos.Msp)
 NIDN : 0122118601

(Dina Martinieller)
 NIDN : 0000036402



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Fakultas



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PTIAK/KP/PT/03/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<https://fkip.umso.ac.id> fkip@umso.ac.id umsoamedan umsoamedan umsoamedan umsoamedan

Nomor : 331/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2026
 Lampiran : -
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Sya'ban 1447 H
 11 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
 di-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: DINA NABILA HASIBUAN
N P M	: 2203100084
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,



DR. ARIFIN S. LELEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Lampiran 8. Surat Terima Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TIMUR
KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I**

Jalan Gunung Krakatau No. 194, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239
Pos-el kelurahanpulobrayandarati5@gmail.com

Nomor : 400.3/34/PDI/R/2026
Lamp : -
Hal : Persetujuan Izin Riset

Medan, 2026

Yth.
Dekan UMSU
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No.331/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2026 perihal Izin Penelitian Mahasiswa UMSU tertanggal 11 Februari 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami bersedia memberi izin untuk melaksanakan kegiatan Riset kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kelurahan Pulo Brayan Darat I.

Berikut ini adalah mahasiswa yang akan melaksanakan Izin Riset:

NPM	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
2203100084	DINA NABILA HASIBUAN	STRATA 1	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Lampiran 9. Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9.2/0910

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 331/KET/Il.3.AU/UJSU-03/F/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
NAMA	: Dina Nabila Hasibuan
NIM	: 2203100084
PROGRAM STUDI	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Efektivitas Fungsi Controlling pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayen Darat I Kota Medan"
LOKASI	: Kelurahan Pulo Brayen Darat-I Kecamatan Medan Timur Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 24 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh ;
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Benny Iskandar, ST, MT
Pembina Utama Muda (M/c)
NIP 19740429200031008

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Timur Kota Medan.
3. Lurah Pulo Brayen Darat - I Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka



SURAT KETERANGAN

Nomor: 01299/KET/ILJ-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dina Nabila Hasibuan
NPM : 2203100084
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Ramadhan 1447 H
 10 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

Lampiran 11. Surat LoA



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Dina Nabila Hasibuan

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Efektivitas Fungsi Controlling Pada Program Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pulo Brayon Darat 1 Kota Medan"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 1, 2026

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

Lampiran 12. Dokumentasi

Gambar 4. Bersama Bapak Lurah Pulo Brayan Darat I



Gambar 5. Bersama Ibu Sekretaris Lurah Pulo Brayan Darat I



Gambar 6. Bersama Ibu Armayani Selaku Warga



Gambar 7. Bersama Ibu Yulaika Selaku Warga

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Dina Nabila Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 20 Januari 2003
NPM : 2203100084
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp : 0822-8025-0910
E-Mail : dinahasibuan451@gmail.com
Anak ke : 4(empat) dari 4 (bersaudara)

Data Orangtua

Nama Ayah : Supri Hidayat
Pekerjaan : BUMN
Nama Ibu : Adek Ani Siregar
Pekerjaan : Kepala Lingkungan
Alamat

Riwayat Pendidikan

2010-2016 : SD Negeri 112166 Aek Nabara
2016-2019 : SMP Negeri 1 Bilah Hulu
2019-2022 : SMA Negeri 1 Kualuh Selatan

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenar-benarnya

Medan, 2 April 2026

Dina Nabila Hasibuan